

Mimbar Sosek

Jurnal Sosial-Ekonomi Pertanian

ISSN 02158434

Volume 17 Nomor 2 : Agustus 2004

Rina Oktaviani dan Sahara

Beras, Ketahanan Pangan dan "World Trade Organization".

Endriatmo Soetarto dan Moh. Shohibuddin

Pemilu DPD dan Ikatan Solidaritas Lokal di Sulawesi

Tengah : Sebuah Penilaian Awal

Ansofino dan Affendi Anwar

Pilihan Kolektif dan Proses Politik Melalui Cara Pemilihan (Voting) : Apakah Merupakan Suatu Jalan Menuju Kepada Perbaikan Kesejahteraan Masyarakat ?

Dwi Sadono

Tahun 2004 Sebagai Tahun Padi Nasional : Upaya Memadukan Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Petani

M. Mustopa Romdhon dan Hermanto Siregar

Daya Saing Industri Kecil Gula Kelapa di Kabupaten Banyumas : Pendekatan Matriks Analisis Kebijakan dan Opsi Kelembagaan



Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
INDONESIA

**PEMILU DPD DAN IKATAN SOLIDARITAS LOKAL DI SULAWESI
TENGAH: Sebuah Penilaian Awal ¹⁾**

Endriatmo Soetarto & Moh. Shohibuddin²⁾

Abstrak

Meski disituasikan dalam konteks jaringan etnis dan kekerabatan yang kuat dan efektif di Sulawesi Tengah, namun pemilu DPD berhasil membawa berbagai perubahan yang signifikan. Dari segi rekrutmen politik, ia mampu menjangkau calon-calon anggota DPD yang beragam latar belakang profesi dan aktivitas sosialnya. Proses pemilu ini juga menyaksikan munculnya mobilisasi politik yang lebih kontraktual yang ditandai dengan komunikasi politik yang sehat, disertai penawaran program-program spesifik, dan merespon isu-isu lokal yang berkembang.

Hasil perolehan suara menunjukkan, peta dukungan politik terkonsentrasikan pada basis-basis dukungan tradisional. Suara terbanyak yang diperoleh calon selalu berkorelasi positif dengan daerah asal tempat jaringan kekerabatannya terdapat.

Dalam konteks pemilu distrik, dukungan berbasis ikatan solidaritas lokal ini sangatlah wajar dan bahkan memiliki signifikansi tersendiri sebagai basis legitimasi baru bagi proses rekrutmen politik dan proses demokratisasi lebih luas.

Secara teoritis, perkembangan selama proses pemilu DPD ini memberi harapan bagi terwujudnya corak "demokrasi deliberatif", yakni demokrasi yang melibatkan pertimbangan masyarakat secara memadai.

**1. DUDUK PERMASALAHAN: TANTANGAN TRANSISI DEMOKRASI DI
INDONESIA**

Hingga sejauh ini transisi demokrasi di Indonesia pasca rezim otoriter birokratis masih dihadapkan pada sejumlah tantangan mendasar. Di satu sisi, proses demokratisasi secara formal telah berlangsung relatif mulus, yakni dalam hal pelembagaan infrastruktur politik dan hukum bagi sistem

¹⁾ Tulisan ini adalah revisi dari paper berjudul "Pergeseran Bentuk-bentuk Solidaritas Tradisional dan Signifikansinya dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Sulawesi Tengah", yang disampaikan dalam Seminar Internasional V Dinamika Politik Lokal di Indonesia. Seminar dengan tema "Demokrasi dan Potret Lokal Pemilu 2004" ini diselenggarakan oleh Percik Salatiga pada tanggal 14-17 Juli 2004.

²⁾ Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada Moh. Miqdad, Rahmat "Oyong" Saleh dan Bardin Louembah yang telah membantu proses pengumpulan data di lapangan.

demokrasi. Hal itu antara lain berupa reformasi pranata-pranata negara, amandemen konstitusi yang lebih peduli pada isu HAM dan *share of power*, proses desentralisasi melalui kebijakan otonomi daerah, dan juga pembaruan sistem pemilu dan sistem perwakilan.

Namun proses demokratisasi membutuhkan bukan hanya pembaruan struktur politik secara formal semata. Buktinya, dinamika politik dan kehidupan sosial selama lima tahun terakhir justru menunjukkan fenomena "masih jauh panggang dari api". Budaya dan perilaku politik para elit di berbagai level pemerintahan dan ranah sosial belum jua mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan keadaban (*civility*) yang sebenarnya. Pembaruan sistem multi-partai misalnya, nyatanya belum berhasil melahirkan partai-partai modern yang mampu mandiri dan menjadi instrumen politik yang efektif untuk menyalurkan aspirasi publik. Partai-partai politik ini justru ditengarai sebagai kendaraan politik belaka bagi kepentingan para elit politik, sebagaimana ditunjukkan oleh maraknya kasus korupsi oleh anggota DPRD baru-baru ini. Dalam tingkatan tertentu, ia bahkan menyuburkan bentuk-bentuk oligarki politik yang cupet yang mengingkari baik cita-cita Ideologis dari partai itu sendiri maupun kepentingan rakyat yang menjadi konstituennya (cf. Kristiadi 2004).

Ditilik dari urgensi pelembagaan partisipasi rakyat, maka kesenjangan di atas menunjukkan bahwa "demokrasi perwakilan" (*representative democracy*), dalam hal ini melalui institusi partai, tidak dengan sendirinya menghasilkan keselarasan antara kepentingan "wakil rakyat" dengan konstituen yang diwakilinya. Inilah yang membentuk jurang yang amat lebar dalam jagad politik Indonesia mutakhir antara sistem "demokrasi perwakilan" di satu sisi dengan demokrasi yang melibatkan partisipasi dan pertimbangan rakyat (*deliberative democracy*) di sisi yang berbeda.

Memang, seperti dikemukakan Dahl (1989), dalam sebuah *national state* ciri-ciri dari demokrasi partisipatif cenderung untuk kian digantikan oleh aturan-aturan prosedural demokrasi. Namun hal ini tidak berarti demokrasi telah mati asalkan ia mengalami suatu transformasi dalam wujud yang disebut Dahl sebagai "poliarki". Yakni ketika ia, selain memenuhi aturan prosedural, juga bersenyawa dengan realitas kemajemukan sosial dan membentuk pusat-pusat otonomi asosiasional.

Sayangnya, hal yang disebut terakhir ini tak kunjung terwujud ketika kapasitas kultural dan modal sosial masyarakat untuk berpartisipasi di arena publik tidak pernah mendapat apresiasi dalam proses politik, padahal preseden kewargaan untuk ini sangatlah kaya (Hefner 2000). Mekanisme partisipasi yang mengacu pada yang medium-medium yang *build in* dalam keseharian masyarakat—misalnya yang terwujud dalam seni, agama, etnis,

budaya, dan lain-lain—tidak terkelola baik dan bahkan dimusuhi sebagai bentuk-bentuk primordialisme. Padahal, inilah yang membentuk "syarat-syarat informal untuk berjalannya demokrasi" sebagaimana dikemukakan Putnam (1993). Ironisnya, pada pihak lain, tidak bisa diingkari bahwa partisipasi politik kepartaian justru banyak mengandalkan kemampuan mobilisasi ikatan-ikatan primordial.

Kesalahan dalam memahami masalah primordialisme ini menyebabkan demokrasi partisipasi yang berbasis pada asosiasi-asosiasi informal tidak pernah terartikulasi dan terlembagakan, bahkan semakin menjauh dari proses demokrasi prosedural dan perwakilan yang berlangsung. Hal ini membuktikan kesenjangan lain dalam perpolitikan Indonesia mutakhir, yaitu antara struktur politik formal di satu sisi dengan budaya politik informal di level masyarakat pada sisi yang berbeda. Kesenjangan ini, ditambah dengan upaya-upaya memanipulasi asosiasi-asosiasi ini sebagai sentimen-sentimen primordial, telah berdampak bukan saja pada merebaknya konflik dan kekerasan primordial, namun pada akhirnya juga pada ambruknya tatanan politik formal itu sendiri (Percik 2004).

Pemilu 2004 baru-baru ini telah melahirkan satu terobosan politik yang sangat menonjol bagi pendalaman proses demokratisasi di Indonesia, yaitu pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara langsung oleh rakyat. Terobosan ini menandai pembaruan sistem perwakilan politik yang selama ini hanya didominasi oleh parpol, yaitu dengan adanya sistem bikameral dalam lembaga perwakilan MPR. Selain terdapat lembaga DPR yang rekrutmen anggotanya dilakukan melalui pemilu parpol, kini juga terdapat lembaga DPD yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat untuk mewakili daerah provinsi.

Secara teoritis, ada tiga hal mendasar yang dapat dilahirkan dari pembaruan sistem perwakilan ini terhadap tantangan demokratisasi yang dikemukakan di atas. *Pertama*, karena rakyat memilih langsung tokoh-tokoh yang akan menjadi wakil daerahnya, maka sistem perwakilan ini dapat menjadi saluran bagi mobilitas politik tokoh-tokoh lokal yang lebih berakar di masyarakat. Keterlibatan para tokoh lokal ini dapat memberikan akses bagi komunikasi dan partisipasi yang lebih nyata antara komunitas lokal dan daerah dalam struktur dan proses politik nasional. *Kedua*, sesuai mandat konstitusionalnya, DPD diberi tugas dan wewenang untuk ikut membahas dan mempertimbangkan penyusunan RUU yang berkaitan dengan: (1) pelaksanaan otonomi dan hubungan pusat dan daerah; (2) pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; (3) pengelolaan sumberdaya alam dan sumber ekonomi lainnya; (4) perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta mengawasi pelaksanaan semua UU yang berkaitan dengan hal-hal

tersebut di atas. Keberadaan DPD dengan demikian akan mendorong proses politik yang jauh lebih peka pada isu-isu daerah; suatu hal yang cenderung diabaikan oleh partai politik yang lebih banyak berkuat dengan isu-isu nasional dan supralokal. *Ketiga*, karena dipilih secara langsung maka anggota-anggota DPD ini memiliki basis konstituen yang sangat jelas, yakni rakyat di daerah yang memilihnya. Hal ini juga memungkinkan adanya kontrak politik dan pelembagaan komunikasi politik serta kontrol politik yang lebih permanen antara anggota DPD dengan para konstituennya.

Dengan mengambil kasus pemilihan anggota DPD di Sulawesi Tengah, paper ini secara empiris hendak mengkaji sejauh mana pembaruan sistem perwakilan ini berlangsung di tingkat lokal ketika ia disituasikan dalam konteks sosio-kultural dan politik regional yang spesifik. Salah satu dinamika politik yang paling menonjol dalam konteks masyarakat di Sulawesi Tengah adalah massifnya mobilisasi ikatan-ikatan solidaritas emosional yang dibentuk oleh identitas kultural yang sama, seperti ikatan etnis, kekerabatan, agama dan sebagainya.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan kritis tersendiri, yakni sejauh mana proses rekrutmen politik pemilu DPD mampu melembagakan partisipasi politik yang lebih demokratis. Ataukah, sebaliknya, proses itu justru mengarah pada penguatan identitas lokal yang lebih tertutup. Sejauh mana pula proses pemilu DPD ini berhasil menciptakan sirkulasi elit dan perimbangan baru dalam struktur sosial masyarakat, ataukah justru rekrutmen politik ini tetap berkisar pada ruang-ruang relasi politik dari kalangan figur tradisional, elit parpol dan aktor-aktor lama yang telah mapan.

Untuk daerah Sulawesi Tengah, pemahaman atas dinamika politik semacam ini menjadi sangat penting. Sebab, Sulawesi Tengah adalah daerah yang dikenal dengan keragaman etnisnya yang sangat kaya serta jalur-jalur kekerabatan besar (*fam*) yang berpengaruh yang interaksi di antaranya amat menentukan dinamika politik regional, seperti dalam pemilihan bupati dan gubernur, kontroversi pemekaran wilayah, dan sebagainya. Pada saat yang sama, konstelasi ini sekaligus juga mencerminkan dominasi parpol tertentu yang pada masa lalu telah membangun hubungan simbiosis mutualisme yang cukup kuat dengan elit-elit daerah.

Dalam konteks demikian penelitian ini akan memberikan penilaian awal mengenai proses pemilihan umum anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah yang baru saja berlangsung dengan mengkaji beberapa isu sebagai berikut.

1. Bagaimanakah secara nyata pola-pola mobilisasi politik yang muncul selama proses rekrutmen politik ini anggota DPD ini. Sejauh mana pola

mobilisasi itu mengandalkan pada bentuk-bentuk ikatan solidaritas tradisional dan sejauh mana pula ikatan-ikatan solidaritas semacam ini telah mengalami pergeseran.

2. Sejauh manakah hasil dari pemilihan anggota DPD ini mencerminkan terjadinya pergeseran konfigurasi elit lokal dengan lahirnya sirkulasi elit dan keseimbangan baru dalam masyarakat, ataukah sebaliknya hal itu justru kian mengokohkan tatanan oligarki lama yang telah mapan.
3. Sejauh mana pula keseluruhan proses pemilu DPD ini telah menyerap dan mengapresiasi persoalan, kultur dan kelembagaan lokal di satu sisi, dan pada saat yang sama mengantarkan pada pelembagaan budaya politik baru yang lebih demokratis dan partisipatif.

Paper ini dibagi menjadi lima bab. Setelah bagian pengantar pada bab pertama, bab kedua akan menyajikan konteks politik dan sosio-kultural di wilayah Sulawesi Tengah. Dinamika politik lokal selama pemilu DPD akan diuraikan pada bab ketiga yang akan mengulas mengenai karakteristik para calon anggota DPD, mobilisasi politik yang dilakukan, dan hasil perolehan suara. Bab berikutnya adalah pembahasan yang akan mengkaji signifikansi dari pemilu anggota DPD ini dalam konteks transformasi budaya politik baru di Sulawesi Tengah. Akhirnya, bab kelima adalah penutup yang menyajikan pokok-pokok kesimpulan dari penelitian ini.

2. KONTEKS POLITIK DAN SOSIO-KULTURAL

Kondisi geografis wilayah Sulawesi Tengah—pusat dari tumbukan patahan-patahan lempeng benua Asia dan Australia yang menyatu dan membentuk pulau Sulawesi—ditandai dengan topografi yang bergunung-gunung dan sulit dijangkau. Kondisi isolasi geografis ini menciptakan keragaman etnis yang sedemikian kaya yang ditandai dengan kemajemukan bahasa, pranata sosial-budaya dan institusi politik masyarakatnya. Kemajemukan sosial ini seolah-olah merupakan refleksi dari panorama alam Wallacea yang memang dikenal memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya.

Adalah Albert C. Kruyt orang yang mula-mula melakukan pemetaan etnis di daerah ini dan merumuskan, atas dasar kekerabatan bahasa, klasifikasi empat kelompok besar yang tercakup dalam etnis Toraja sebagai berikut: Toraja Saadang, Toraja Paloa, Toraja Koro, dan Toraja Poso. Istilah "Toraja" sendiri, yang secara harfiah berarti "orang gunung", dipakai Kruyt sebagai pengganti istilah kolektif "Alfuru" untuk menamai suku-suku yang masih "kafir"; suatu penamaan yang oleh Kruyt dianggap merendahkan.

Sejak itu istilah "Toraja" mulai dikenal dan menjadi populer dalam tulisan-tulisan ilmiah.

Dari keempat kelompok etnis tadi yang pertamalah yang kemudian dikenal sebagai suku yang berjudul Toraja, yakni yang berada di wilayah Sulawesi Selatan. Kruyt sendiri menyebut kelompok ini sebagai kelompok induk. Dari sini sebagian mereka kemudian menyebar ke utara, berdiaspora, dan membentuk suku-suku yang kini mendiami wilayah Sulawesi Tengah, dan dianggap penduduk asli daerah itu.

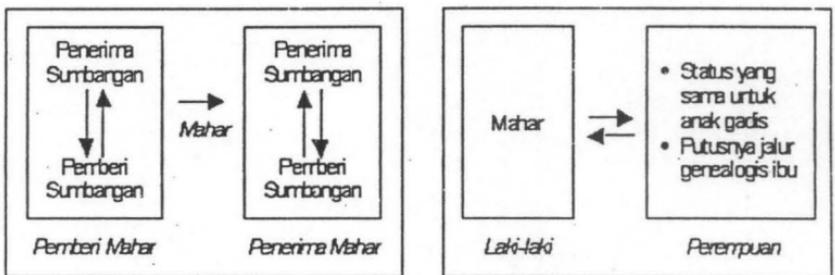
Walter Kaudern, mengikuti argumen Kruyt, menjelaskan perpindahan yang membentuk tiga kelompok Toraja yang lain itu sebagai berikut. Dari wilayah Sulawesi Selatan mereka menuju ke wilayah Sulawesi Tengah dari arah tenggara Malili, terus ke utara, barat laut, langsung menuju ke daerah pegunungan sebelah barat danau Poso. Dari sini mereka tersebar lagi ke arah barat daya, ke utara, sampai ke pegunungan Toli-toli. Selain itu, mereka juga menyebar hingga ke pantai teluk Tomini dan daerah pantai utara dan timur laut Sulawesi.

Keragaman etnis semacam ini, dan hambatan-hambatan geografis yang demikian sulit, menjadi faktor utama yang menjelaskan tiadanya struktur politik yang bersifat sentralistik dan didasarkan pada penguasaan teritorial, sebagaimana kerajaan-kerajaan di Jawa. Kerajaan-kerajaan kecil di Sulawesi Tengah tidaklah mendasarkan diri pada penguasaan teritorial semacam ini akan tetapi lebih merupakan kerajaan-kerajaan etnis yang merasa nyaman dalam otonomi dan isolasi mereka masing-masing.¹ Variasi yang agak berbeda adalah kerajaan-kerajaan Islam di dataran tepi pantai yang strukturnya lebih kompleks karena menerima pengaruh dari luar melalui akses perhubungan laut yang mudah.

Kerajaan-kerajaan etnis ini, terpisah satu sama lain tanpa infrastruktur politik yang menyatukan, dipaksa untuk membuat aliansi-aliansi politik untuk menghindari konflik di antara mereka sendiri maupun untuk bekerja sama dalam menghadapi serangan musuh dari luar. Hal inilah yang membentuk ikatan-ikatan federasi, misalnya *patanggota* (aliansi empat sub etnis Kulawi) di daerah Kulawi atau, yang lebih terkenal, *pitunggota ngata kaili* (aliansi tujuh sub etnis Kaili) di daerah lembah Palu.

¹ Bandingkan dengan Soetarto (2002) yang mengaitkan lemahnya ikatan sosial antar etnis ini dengan corak sistem pertanian huma. Sistem produksi ini—yang tidak memerlukan irigasi secara kontinyu—membuat tiadanya kebutuhan untuk melakukan pengorganisasian sosial yang rumit dan terdeferensiasi serta yang menjangkau wilayah teritori yang luas sepanjang daerah aliran sungai.

Sistem perkawinan adalah pranata sosial-budaya yang kemudian memapankan ikatan-ikatan federasi antar etnis ini.² Secara sosial, ikatan federasi ini dipertahankan, diperkokoh, dan diberi simbolisasi budaya melalui sistem kekerabatan (*fam*) sehingga ikatan itu pun terabadikan dalam hubungan-hubungan darah yang abadi dan keramat. Sedangkan secara ekonomi, ikatan federasi tadi ditransformasikan ke dalam jalinan resiprositas tradisional yang berpusat pada dan digerakkan oleh tukar menukar pemberian dan penerimaan mahar. Jalinan resiprositas ini, selain berlangsung di antara pasangan pengantin, juga berlangsung di antara etnis yang menjadi pihak pemberi mahar sendiri maupun etnis yang menerima mahar tersebut. Resiprositas yang terakhir ini terkait dengan kewajiban timbal balik di antara mereka untuk memberikan sumbangan ketika kerabatnya dikenai kewajiban membayar mahar. Dua bentuk resiprositas tradisional ini secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1
Dua Bentuk Resiprositas dalam Perkawinan Adat
 (Dikutip dari Shohibuddin, 2003)

Dengan demikian, dalam sebuah peristiwa perkawinan, bergetarlah seluruh jaringan relasi sosial dan kekerabatan yang seringkali melintasi batasan etnik dan desa, dengan efek diperkuatnya solidaritas dan ikatan kekerabatan antar komunitas dan sekaligus memantapkan ikatan-ikatan federasi antar etnis.

3. DINAMIKA POLITIK LOKAL SELAMA PEMILU DPD

Politik lokal di Sulawesi Tengah, khususnya di bidang pemerintahan, dalam batas tertentu masih banyak dipengaruhi oleh struktur

² Ulasan mengenai sistem perkawinan ini mengacu pada Shohibuddin (2003).

kekerabatan dan warisan aliansi kerajaan pra-kolonial yang dikemukakan di atas. Hal ini dapat terjadi karena pada masa kolonial, pemerintah Hindia Belanda (dalam rangka kebijakan politik *indirect rule*-nya) telah menjadikan kerajaan-kerajaan etnis tadi sebagai bagian dari struktur birokrasi kolonial, sementara para pemimpinnya ditetapkan sebagai Kepala Distrik (*Bestuurder*). Dengan demikian, para elit tradisional ini memperoleh status politik yang lebih formal dengan segala hak istimewanya.

Situasi ini masih menyisakan jejak bahkan hingga sekarang. Hal ini sangat wajar karena para penerus elit tersebut praktis memiliki lebih banyak keunggulan dibanding yang lain mengingat mereka lebih dulu memperoleh akses pendidikan, informasi, relasi politik, di samping mempunyai modal kultural itu sendiri sesuai status tradisional yang dimilikinya. Sebagai contoh, Gubernur dan beberapa Kepala Daerah Tingkat II yang menjabat di Sulawesi Tengah saat ini merupakan tokoh-tokoh yang berasal dari lingkungan kekerabatan elit-elit semacam ini. Bahkan aliansi antar kerajaan pada masa lampau juga sering diartikulasikan untuk menyuarakan kepentingan politik kontemporer. Dinobatkannya Bupati Donggala yang menjabat sekarang sebagai *Magau* (sebutan buat pemimpin kerajaan pada masa lampau) pada akhir Mei lalu adalah ilustrasi mengenai hal ini. Oleh beberapa kalangan, peristiwa ini dinilai ada kaitannya dengan upaya-upaya percepatan pembentukan Kabupaten Sigi-Dolo yang terpisah dari Kabupaten Donggala.

Dalam konteks semacam ini sangat menarik untuk melihat bagaimana dinamika politik yang berlangsung selama proses pemilu DPD yang baru saja berlalu. Apakah konstelasi seperti dikemukakan di atas juga tercermin di dalam pemilu DPD kali ini. Ataukah, seperti dikemukakan oleh Waris (2003),³ ada kecenderungan bergesernya bandul politik di Sulawesi Tengah yang saat ini relatif masih didominasi oleh kalangan tertentu.

3.1. Karakteristik Calon Anggota DPD

Pemilu DPD Provinsi Sulawesi Tengah diikuti oleh 25 kontestan yang bersaing untuk memperoleh dukungan dari rakyat. Dari 25 calon anggota DPD ini, hanya satu orang saja yang perempuan. Sementara komposisi dari segi kelompok umur menyebar secara merata. Sebanyak enam orang (24%) masuk dalam kelompok umur 31-40 tahun; tujuh orang (28%) masuk dalam kelompok umur 41-50 tahun, dan tiga orang (12%) masuk dalam kelompok umur 51-60 tahun. Dengan demikian, sebanyak 16 orang (64%) calon anggota DPD masuk dalam kelompok umur 60 tahun ke bawah, sementara yang masuk dalam kelompok umur 61-70 tahun berjumlah

³ Kutipan wawancara Irwan Waris, Tempo 17 Desember 2003.

sembilan orang (36%). Jadi secara umum komposisi calon anggota DPD ini didominasi oleh kategori usia produktif, dengan persentase kalangan figur muda yang juga cukup menonjol.

Dari segi latar belakang pendidikan, mayoritas calon anggota DPD adalah lulusan S1, yaitu sebanyak 13 orang (52%). Urutan terbanyak kedua adalah lulusan SMA sebanyak enam orang (24%). Calon anggota DPD yang berpendidikan pascasarjana (S2) menempati urutan ketiga sebanyak empat orang (16%), dan disusul lulusan akademi sebanyak dua orang (8%).

Latar belakang profesi para calon juga memberikan gambaran yang menarik. Sebanyak tujuh orang (28%) calon anggota DPD memiliki profesi akademisi sebagai dosen di PTN; sebanyak empat orang (16%) adalah pensiunan pejabat di lembaga pemerintah, seorang di antaranya adalah pensiunan pejabat pemerintah pusat; dan satu orang (4%) adalah purnawirawan TNI AD. Total calon anggota DPD yang memiliki latar belakang sebagai Pegawai Negeri, baik yang masih menjabat maupun sudah purnakarya, adalah sebanyak 12 orang (48%).⁴ dengan pengalaman profesi sebagaimana tersebut dalam tabel berikut.

Tabel 1. Latar Belakang Profesi dan Aktivitas Kemasyarakatan Calon Anggota DPD yang Berstatus Pegawai Negeri atau Pensiunan Pegawai Negeri

No Calon	Umur	Dosen	Purnawirawan TNI	Mantan Pejabat Pemerintah	Mantan Anggota Legislatif	Aktifis LSM	Organisasi Kemasyarakatan	Partai Politik
2	70 th	✓						
4	56 th	✓						✓
7	52 th	✓				✓		
8	63 th	✓					✓	
9	64 th			✓			✓	
11	66 th			✓			✓	
13	47 th	✓					✓	
15	46 th			✓			✓	
16	63 th		✓		✓			
17	63 th	✓						
18	42 th			✓				
21	62 th	✓			✓			

Sumber: Diolah dari data KPUD Provinsi Sulawesi Tengah

Keterangan: Nomor Calon adalah nomor pada kartu suara sesuai dengan penetapan KPU

⁴ Sesuai ketentuan UU, pegawai negeri yang mencalonkan diri sebagai DPD harus mengundurkan diri dari kepegawaiannya. Apabila aturan ini dipatuhi, berarti kedua belas orang ini sudah berstatus purnakarya semenjak pencalonannya sebagai anggota DPD.

Adapun profesi dari para calon anggota DPD yang tidak pernah menjadi Pegawai Negeri juga menampilkan gambaran yang tidak kurang menariknya karena berasal dari berbagai jenis profesi dan latar belakang aktivitas, sebagaimana diringkaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. Latar Belakang Profesi dan Aktivitas Kemasyarakatan Calon Anggota DPD yang Tidak Berstatus Pegawai Negeri atau Pensiunan Pegawai Negeri

No Calon	Umur	Dosen	Profesional	Media Massa	Aktivis LSM	Organisasi Kemasyarakatan	Partai Politik
1	57 th			✓		✓	
3	45 th					✓	✓
5	38 th		✓	✓		✓	
6	65 th		✓				
10	33 th		✓			✓	✓
12	31 th				✓		
14	43 th		✓				
19	49 th			✓			
20	40 th	✓				✓	
22	48 th		✓				
23	41 th		✓				✓
24	36 th			✓			
25	34 th				✓		

Sumber: Diolah dan data KPUD Provinsi Sulawesi Tengah

Dari gambaran di atas tampak bahwa latar belakang calon anggota DPD sangatlah beragam, khususnya dari sisi latar belakang profesi dan aktivitas sosialnya. Data yang diringkaskan dalam Tabel 1 dan Tabel 2 juga menunjukkan bahwa hanya sebagian saja calon anggota DPD yang berstatus pegawai negeri atau pensiunan pegawai negeri (48%), dan dari jumlah ini hanya empat orang (16%) yang pernah duduk sebagai pejabat di birokrasi pemerintah. Jumlah calon anggota DPD yang punya latar belakang pernah duduk di lembaga legislatif jumlahnya sangat kecil, yaitu sebanyak dua orang (8%). Sedangkan calon anggota DPD yang pernah menjabat sebagai pengurus partai berjumlah empat orang saja (16%).

Dengan demikian, sebagian besar dari calon anggota DPD yang berkompetisi dalam pemilu yang baru lalu adalah para pendatang baru di dunia politik dan belum pernah masuk dalam sirkulasi elit politik sebelumnya. Calon-calon anggota DPD dari kalangan tokoh-tokoh muda juga termasuk dalam kategori kelompok terakhir ini.

3.2. Pola-pola Mobilisasi Politik

Pemilu DPD yang anggotanya dipilih secara langsung oleh masyarakat sangatlah berbeda coraknya dari pemilu DPR dan DPRD yang pesertanya adalah partai politik. Dalam hal mobilisasi dukungan politik, misalnya, pada pemilu DPR dan DPRD mesin politik partailah yang lebih banyak berperan. Sementara dalam pemilu DPD, praktis tidak ada mesin politik yang tersedia sehingga mobilisasi dukungan politik lebih banyak mengandalkan pada ketokohan individu calon anggota DPD.

Mempertimbangkan faktor ketokohan individu dalam mobilisasi dukungan politik ini, Qodari (2004) menyebutkan lima kategori latar belakang calon anggota DPD yang berpeluang besar terpilih dalam kompetisi pemilu. Pertama adalah mantan pejabat yang berpeluang terpilih karena nama mereka relatif dikenal luas oleh masyarakat. Kedua adalah pengusaha besar karena memiliki dana dan dukungan karyawan yang besar yang dapat mereka mobilisasi. Ketiga, tokoh dari organisasi agama berpeluang besar terpilih karena jenis organisasi yang paling banyak diikuti oleh masyarakat Indonesia adalah organisasi agama. Keempat, figur yang merupakan tokoh etnis juga memiliki peluang yang besar karena disokong oleh solidaritas emosional yang dibentuk oleh kesamaan identitas kesukuan. Kelima adalah veteran pengurus partai karena selain berpengalaman dalam membina konstituen dan menggalang dukungan, ia juga dapat memanfaatkan jaringan partainya untuk memobilisasi dukungan politik.

Proses pemilu DPD yang berlangsung di Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu telah memunculkan sejumlah pola mobilisasi politik yang dilakukan para calon anggota DPD dalam rangka menggalang dukungan suara. Setidaknya, ada lima pola mobilisasi politik yang dilakukan oleh para calon selama proses pemilu. Pertama, mobilisasi melalui jalur solidaritas agama, baik di lingkungan pemeluk Islam, Kristen, maupun Katolik. Kedua, mobilisasi melalui jalur solidaritas etnis atau kekerabatan. Ketiga, mobilisasi melalui jalur jaringan organisasi masyarakat atau LSM. Keempat, mobilisasi dengan memanfaatkan isu gender untuk merangkul suara pemilih perempuan. Dan kelima, mobilisasi dengan melakukan komunikasi politik yang intens dengan seluruh lapisan dan komponen masyarakat dengan menawarkan isu-isu spesifik untuk memperoleh dukungan politik atas dasar pilihan rasional dan kontraktual.

Seperti terlihat, pola pertama dan kedua moncornirkan bentuk mobilisasi politik yang didasarkan pada ikatan solidaritas tradisional yang bersifat primordial. Sedangkan pola ketiga hingga kelima moncornirkan bentuk mobilisasi politik yang lebih didasarkan pada ikatan-ikatan dan relasi-relasi sosial baru yang lebih modern dan terbuka. Fakta empiris selama

proses pemilu DPD memperlihatkan bahwa, sejauh menyangkut pola mobilisasi, latar belakang calon yang berasal dari mantan pejabat, pengusaha dan veteran pengurus partai ternyata tidak signifikan karena tidak menciptakan pola mobilisasi yang unik. Bentuk-bentuk mobilisasi politik yang dilakukan para calon anggota DPD tergambar dalam tabel berikut ini.

Tabel 3. Pola Mobilisasi Politik Calon Anggota DPD

No Calon	1. Solidaritas Agama		2. Solidaritas Kekerabatan/Etnis		3. Jaringan Ormas/LSM		4. Wacana Barter		5. Komunikasi Politik yg Berbasis Kontraktual	
	Potensi	Mobilisasi	Potensi	Mobilisasi	Potensi	Mobilisasi	Potensi	Mobilisasi	Potensi	Mobilisasi
1	Ada	Ya	Ada	Ya	Tidak	Tidak	-	Tidak	Tidak	Tidak
2	Tidak	Tidak	Ada	Tidak	Tidak	Tidak	-	Tidak	Ada	Ya
3	Ada	Ya	Ada	Ya	Ada	Ya	-	Tidak	Ada	Tidak
4	Tidak	Tidak	Ada	Ya	Tidak	Tidak	-	Tidak	Ada	Ya
5	Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Ya	-	Tidak	Ada	Ya
6	Tidak	Tidak	Ada	Ya	Tidak	Tidak	-	Tidak	-	-
7	Tidak	Tidak	Ada	Ya	Ada	Ya	-	Tidak	Ada	-
8	Ada	Ya	Ada	Ya	Ada	Ya	-	Tidak	Ada	Ya
9	Tidak	Tidak	Ada	Ya	Tidak	Tidak	-	Tidak	-	-
10	Tidak	Tidak	Ada	Ya	Ada	Ya	Ada	Ya	Ada	Ya
11	-	Tidak	Ada	Tidak	-	-	-	Tidak	Ada	-
12	Tidak	Tidak	-	-	Ada	Ya	-	Tidak	Ada	Ya
13	Tidak	Tidak	Ada	Ya	Ada	Ya	-	Tidak	Ada	-
14	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Ya	-	Tidak	Ada	-
15	Ada	Ya	Ada	Ya	Ada	Ya	-	Tidak	Ada	Tidak
16	Ada	Ya	Ada	Ya	Ada	Ya	-	Tidak	Ada	-
17	Tidak	Tidak	Ada	Ya	Tidak	Tidak	-	Tidak	Ada	Ya
18	Tidak	Tidak	Ada	Ya	Tidak	Tidak	-	Tidak	-	-
19	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	-	Tidak	Ada	Ya
20	Ada	Ya	Ada	Ya	Ada	Ya	-	Tidak	Ada	Ya
21	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	-	Tidak	-	-
22	Tidak	Tidak	Ada	Ya	Tidak	Tidak	-	Tidak	-	-
23	Tidak	Tidak	Ada	Ya	Ada	Tidak	-	Tidak	-	-
24	Tidak	Tidak	Ada	Ya	Tidak	Tidak	-	Tidak	Ada	Ya
25	Tidak	Tidak	Ada	Ya	Ada	Ya	-	Tidak	Ada	Ya
		Ya=6 kss		Ya= 18 kss		Ya=12 kss		Ya=1 kasus		Ya=11 kss

Sumber: Data Primer

Keterangan: Tanda - berarti tidak ada data untuk kolom dimaksud

Beberapa calon anggota DPD yang tidak bersedia untuk diwawancarai atau yang tidak berhasil ditemui telah menyebabkan terbatasnya informasi yang dapat diperoleh mengenai pola-pola mobilisasi politik yang dilakukan oleh setiap calon. Bagaimanapun, tabel di atas telah memberikan gambaran mengenai variasi pola-pola mobilisasi ini di antara para calon.

Dengan mengacu pada tabel di atas, tampak bahwa penggalangan dukungan politik yang dilakukan oleh para calon anggota DPD tidaklah terbatas hanya pada satu pola saja, namun dengan menggabungkan beberapa pola mobilisasi. Dari berbagai pola ini, ternyata mobilisasi politik

dengan memanfaatkan ikatan solidaritas etnis/kekerabatan merupakan pola yang paling banyak digunakan oleh calon anggota DPD. Menyusul pada urutan berikutnya adalah mobilisasi melalui jaringan organisasi kemasyarakatan/LSM.

Dominannya mobilisasi politik berbasis ikatan solidaritas etnis/kekerabatan ini tampaknya konsisten dengan konteks sosio-kultural di Sulawesi Tengah. Sebagaimana telah disinggung di atas, wilayah ini ditandai oleh adanya jaringan kekerabatan yang luas dan bersifat informal, namun yang seringkali diartikulasikan di dalam proses politik formal. Meskipun demikian, gambaran lain yang menarik dari tabel di atas adalah adanya sejumlah calon anggota yang, kendati memiliki jaringan kekerabatan cukup luas, namun secara sadar tidak mau melakukan mobilisasi politik berbasis ikatan primordial ini. Salah satu calon bahkan dengan tegas menyatakan bahwa ia lebih baik tidak terpilih daripada harus memanipulasi ikatan-ikatan solidaritas primordial ini. Sebab, baginya, mobilisasi semacam itu sama sekali tidak produktif bagi upaya-upaya pelebagaan proses politik yang sehat dan pengembangan tatanan masyarakat warga yang lebih modern.

Sejalan dengan gejala terakhir ini, gambaran lain yang juga menarik dari tabel di atas adalah jumlah yang cukup signifikan dalam pola mobilisasi politik yang bersifat rasional dan kontraktual. Pola ini dilakukan dengan mengembangkan komunikasi politik yang sehat, melalui penawaran program-program spesifik, maupun perhatian pada isu-isu lokal yang berkembang di masyarakat. Hal ini menandakan bahwa proses pemilu DPD telah berfungsi menjadi sarana pendidikan politik yang, dalam kadar tertentu, jauh lebih baik dibanding yang berlangsung dalam pemilu anggota DPR dan DPRD.

Urutan berikutnya adalah pola mobilisasi politik yang berbasis ikatan solidaritas agama. Mobilisasi ini dilakukan melalui organisasi-organisasi keagamaan ataupun melalui kongregasi gereja. Salah satu yang menonjol dari mobilisasi jenis ini adalah yang dilakukan oleh satu-satunya calon yang berasal dari kalangan Protestan. Menurut pengakuannya, ia berhasil menggalang dukungan dari semua Gereja, seperti GKST, BK, bahkan juga GPdI. Hanya dukungan dari GPID saja yang menurutnya terpecah karena sebagian mendukung calon lain yang beragama Katolik atas dasar kesamaan etnis/kekerabatan.⁵ Sedangkan mobilisasi solidaritas keagamaan di lingkungan pemeluk Islam terjadi melalui dua organisasi agama, yaitu Muhammadiyah dan Al-Khaerat.⁶ Dalam kasus Al-Khaerat,

⁵ GKST=Gereja Kristen Sulawesi Tengah; BK=Bala Keselamatan; GPdI= Gereja Pantekosta di Indonesia; GPID=Gereja Protestan Indonesia di Donggala.

⁶ Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang secara teologis membawa gagasan purifikasi agama dan secara sosiologis umumnya didukung oleh kalangan menengah ke atas di wilayah

dukungan suara anggotanya diperebutkan oleh tiga calon yang sama-sama merupakan tokoh teras di dalam Pengurus Besar Al-Khaerat.

Mobilisasi dukungan politik yang dilakukan melalui penyampaian wacana jender ternyata hanya dilakukan oleh satu orang saja yang kebetulan adalah perempuan satu-satunya di antara calon anggota DPD. Hal ini mengherankan dengan mengingat cukup banyaknya jumlah pemilih perempuan pada pemilu kemarin. Di lain pihak, skor Indeks Pembangunan Jender (IPJ) untuk Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 1999 hanya mencapai angka 54.1 atau menempati urutan ke-19 secara nasional. Skor ini menandakan masih tertinggalnya kaum perempuan di daerah ini, terutama menyangkut angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan proporsi angkatan kerja. Hampir absennya wacana jender ini dalam proses pemilu DPD kemarin menunjukkan bahwa perhatian masyarakat terhadap isu jender ini masih terbatas sekali, termasuk di antara para calon anggota DPD.

3.3. Hasil Perolehan Suara

Dari total jumlah pemilih di Sulawesi Tengah sebanyak 1,3 juta orang, suara sah yang dihasilkan dari pemungutan suara yang baru lalu mencapai 1,1 juta suara. Ini berarti cukup banyak suara yang tidak masuk, baik karena sikap golput, tidak mendapatkan kartu pemilih, ataupun karena suara tidak sah. Dari jumlah suara yang sah ini, perolehan suara total untuk calon anggota DPD lebih besar 2,3% dibanding yang diperoleh oleh calon anggota DPR RI dari berbagai partai. Begitu juga, calon anggota DPD dengan perolehan suara terbanyak memperoleh suara 57% lebih besar daripada calon anggota DPR RI dengan perolehan suara terbanyak.

Perbandingan semacam ini menunjukkan menonjolnya popularitas calon anggota DPD dibanding calon anggota DPR RI. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini. Pertama, persepsi pemilih terhadap kinerja parpol cenderung negatif, seperti ditunjukkan oleh beberapa studi di daerah lain (Haris dkk, tt.). Kedua, rumitnya sistem pemilu legislatif tahun 2004 ini membuat banyak suara untuk anggota DPR dan DPRD tidak sah. Sementara untuk suara yang sah, sebagiannya hanya memberikan suara dengan menusuk tanda gambar partai saja tanpa memilih nama calegnya. Ketiga, dukungan suara yang lebih besar pada calon anggota DPD ini amat terkait dengan popularitas mereka sendiri karena merupakan tokoh-tokoh lokal yang lebih dikenal oleh masyarakat.

perkotaan. Sedangkan Al-Khaerat adalah organisasi Islam yang secara teologis lebih bercorak sufistik dan cenderung toleran terhadap ekspresi-ekspresi keagamaan lokal. Sementara secara sosiologis organisasi ini pada umumnya didukung oleh penduduk pedesaan. Mirip dengan organisasi NU yang ada di Jawa.

Tabel berikut menyajikan hasil perolehan suara calon anggota DPD pada Pemilihan Umum tahun 2004 di Provinsi Sulawesi Tengah.

Tabel 4. Perolehan Suara Calon Anggota DPD Per Kabupaten/Kota

NO CALON	PEROLEHAN SUARA										TOTAL
	Donggala	Morowali	Pene	Tojo Una-una	Parigi Moutong	Banggai	Luwuk	Toli - toli	Buol	Palu	
1	8.228	10.448	2.297	17.804	13.263	2.199	8.697	3.279	1.794	4.052	71.861
2	7.37	1.606	1.832	124	6.5	1.736	2.772	4.281	1.43	4.462	31.928
3	9.254	3.649	2.611	2.392	22.986	2.486	6.986	2.604	2.166	4.862	58.996
4	10.65	1.169	690	854	4.972	1.072	2.648	1.66	912	7.429	31.956
5	32.396	6.17	2.896	7.234	16.404	2.321	8.528	3.438	2.427	19.871	101.861
6	6.495	3.858	1.244	1.664	4.98	1.168	3	4.015	21.3	3.199	49.833
7	6.63	6.03	1.893	1.481	6.715	1.323	3.423	3.24	2.117	5.316	35.238
8	8.3	6.62	1.882	1.481	6.673	1.824	4.427	2.696	1.529	6.368	40.778
9	3.04	1.406	700	763	6.17	9.61	17.606	1.941	948	7.278	43.381
10	18.941	10.846	6.604	2.166	21.993	29.264	34.036	40.339	9.629	12.032	188.337
11	1.309	1.366	142	261	1.307	4.378	7.057	481	266	972	17.536
12	4.444	827	856	282	2.195	449	1.894	3.635	960	2.206	17.837
13	3.015	1.227	944	408	2.98	440	1.156	739	459	1.578	12.946
14	6.629	1.01	599	236	6.262	471	1.438	2.882	746	2.698	22.961
15	11.426	18.448	42.96	1.899	6.047	11.061	13.034	2.216	1.187	8.253	113.432
16	7.236	2.76	16.97	327	3.945	2.743	2.405	888	724	3.336	40.234
17	2.417	670	662	341	2.218	422	861	825	492	5.322	14.82
18	3.196	424	434	379	3.183	668	2.172	927	464	1.807	13.654
19	10.347	689	1.029	612	4.265	1.527	1.245	609	286	2.592	23.081
20	20.846	6.026	3.211	7.088	15.38	2.414	8.011	3.796	1.196	16.869	83.425
21	6.444	1.261	967	771	4.095	806	2.94	3.82	1.735	4.184	27.017
22	3.016	2.016	3.712	6.634	6.701	1.637	12.226	800	521	1.609	38.771
23	3.822	362	219	196	1.787	336	510	426	260	3.567	11.455
24	11.668	2.467	608	407	2.259	370	836	1.027	636	5.66	26.623
25	16.898	363	799	993	2.794	1.209	2.091	663	168	4.638	29.586
TOTAL	228.919	89.224	94.28	58.389	172.668	81.824	148.898	90.717	54.3	133.332	1.144.478

Sumber: KPUD Provinsi Sulawesi Tengah

Catatan: Untuk perolehan suara Kabupaten Donggala belum termasuk Desa Oti, untuk Kabupaten Toli belum termasuk Kecamatan Baolan.

Dari tabel di atas terlihat adanya konsentrasi suara beberapa calon anggota DPD di daerah-daerah tertentu dengan perolehan suara yang cukup banyak (> 10.000 suara). Distribusi semacam ini sangat menarik untuk dilihat lebih mendalam basis dukungan apa yang ada di daerah tersebut yang menyebabkan besarnya perolehan suara calon-calon tertentu. Dengan melihat konstelasi ini dapat diketahui faktor apa yang lebih dominan dalam menentukan perolehan suara seseorang di daerah tertentu. Tabel berikut ini menampilkan gambaran mengenai basis dukungan beberapa calon di berbagai daerah.

Distribusi perolehan suara dalam tabel di atas memperlihatkan bahwa perolehan suara terbanyak (>10.000) masing-masing calon diperoleh di daerah yang merupakan kampung halamannya. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya sumber terbanyak dukungan suara diperoleh calon pada daerah asalnya di mana jaringan kekerabatannya cukup kuat dan calon

tersebut dikenal baik oleh masyarakat setempat. Hal itu sekaligus membuktikan bahwa solidaritas kekerabatan ternyata masih menjadi dasar utama bagi masyarakat dalam menentukan preferensi pilihan dan pengelompokan dukungan politik pada pemilu DPD yang baru lalu.

Tabel 5. Basis Dukungan Beberapa Calon Anggota Dengan Perolehan Lebih 10.000 Suara

No Calon	Asal Kampung Halaman	Daerah Tempat Memperoleh Suara Terbanyak	Jumlah Perolehan Suara	Persentase Perolehan di Daerah tsb	Peringkat Suara di Daerah tsb
1	Tojo Una-una	Tojo Una-una	17.604	30,1%	1
3	Donggala	Parigi Moutong	22.986	13,3%	1
4	Palu	Donggala	10.65	4,8%	7
5	Donggala	Donggala	32.396	14,6%	1
6	Buol	Buol	21.3	39,2%	1
9	Luwuk	Luwuk	17.506	11,7%	2
10	Toli-Toli	Toli-Toli	40.139	44,2%	1
15	Morowali	Poso	42.963	45,5%	1
19	Donggala	Donggala	10.347	4,6%	8
20	Poso	Donggala	20.846	9,4%	2
22	Banggai	Luwuk	12.226	8,2%	4
24	Palu	Donggala	11.558	5,2%	5
25	Palu	Donggala	15.898	7,1%	4

Sumber: Diolah dari data KPUD Provinsi Sulawesi Tengah

Catatan: Kota Palu dan Kab. Parigi Moutong adalah pemekaran Kab. Donggala; Kab. Morowali dan Tojo Una-una adalah pemekaran Kab. Poso. Kab. Banggai dan Luwuk merupakan pemisahan dari Kab. Luwuk Banggai. Pada kenyataannya, pemekaran daerah ini tidak memutuskan jaringan kekerabatan dan ikatan solidaritas lain yang sudah ada sebelumnya.

Pengecualian dari kecenderungan umum ini adalah calon yang bernomor 20. Meskipun berasal dari daerah Poso, namun calon ini mendapatkan suara terbesarnya di Donggala di mana ia menempati peringkat kedua perolehan suara. Dukungan cukup besar di Donggala terhadap calon dari luar daerah ini agaknya lebih ditentukan oleh ikatan solidaritas keagamaan daripada solidaritas kekerabatan. Sebab, calon ini dikenal luas sebagai dai terkenal dan tokoh teras dalam Pengurus Besar Al-Khaerat, sementara Donggala merupakan salah satu basis utama organisasi keagamaan ini. Begitu juga, besarnya suara yang diperoleh oleh calon

bernomor 15 di daerah Poso dan kabupaten pecahannya (Morowali) juga merupakan pengaruh dari ikatan solidaritas keagamaan yang cukup kental, meskipun jaringan kekerabatannya di daerah ini juga cukup kuat.

Pola dukungan suara yang cukup besar di lingkungan daerah asal sendiri ini terlihat konsisten ketika dihadapkan pada peta dukungan politik masing-masing daerah selama proses pemilu DPD. Tabel berikut menyajikan gambaran seputar peta dukungan di setiap daerah pada pemilu DPD lalu yang kian menegaskan kaitan antara daerah asal dengan signifikansi perolehan suara.

Tabel 6. Peta Dukungan Politik pada Tiap-tiap Daerah dalam Pemilu DPD

Nama Daerah	Calon Dengan Dukungan Suara Terbanyak I	Asal Calon	Calon Dengan Dukungan Suara Terbanyak II	Asal Calon
Donggala	5	Donggala	20	Poso
Palu	5	Donggala	20	Poso
Morowali	15	Morowali	10	Toli-Toli
Poso	15	Morowali	16	Minahasa
Tojo Una-una	1	Tojo Una-una	5	Donggala
Parigi Moutong	3	Donggala	10	Toli-Toli
Banggai	10	Toli-toli	15	Morowali
Luwuk	10	Toli-toli	15	Morowali
Toli-Toli	10	Toli-toli	2	-
Buol	6	Buol	10	Toli-Toli

Sumber: Diolah dari data KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Seperti ditunjukkan dalam tabel di atas, dukungan suara terbanyak di daerah Donggala dan Palu diperoleh oleh calon bernomor lima yang memang memiliki jaringan kekerabatan luas di daerah ini. Begitu juga, dukungan terbesar di Tojo Una-una, Buol dan Parigi Moutong diperoleh oleh calon yang memang berasal dari daerah tersebut dan memiliki kekerabatan luas di sana.

Fenomena yang cukup menonjol adalah calon bernomor 10 yang berhasil mendapatkan dukungan terbanyak di tiga daerah sekaligus. Bagaimanapun, dukungan di ketiga daerah ini juga tidak lepas dari ikatan kekerabatannya yang memang cukup luas di daerah timur Provinsi Sulawesi Tengah. Di Toli-toli, calon perempuan satu-satunya ini mendapatkan suara

terbanyak karena daerah ini merupakan daerah asalnya dan tempat berada jaringan kekerabatan ayahnya yang menjabat sebagai Bupati Toli-Toli. Sementara di Luwuk dan Banggai yang kini menjadi dua kabupaten terpisah, ia juga mendapatkan dukungan suara terbanyak berkat jaringan kekerabatan ibunya yang cukup luas di sini. Sebagaimana sang ayah di Toli-Toli, ibu dari calon bernomor 10 ini juga merupakan keturunan keluarga bangsawan yang berpengaruh di kedua daerah ini.

Variasi dari pola umum di atas adalah daerah Poso dan pecahannya, Kabupaten Morowali. Dukungan terbanyak di kedua kabupaten ini diperoleh calon bernomor 15. Seperti telah disinggung di muka, dukungan ini selain berasal dari jaringan kekerabatan calon ini yang cukup luas, juga sangat ditentukan oleh ikatan solidaritas keagamaan yang cukup kental di sana sebagai daerah yang sempat beberapa kali dilanda "konflik keagamaan".

4. PEMILU DPD PROVINSI SULTENG: LAHIRNYA KONSTELASI DAN BUDAYA POLITIK BARU?

Seperti terlihat dalam uraian terdahulu, bentuk-bentuk ikatan solidaritas lokal seperti ikatan solidaritas etnis, kekerabatan, dan agama banyak mewarnai proses dan dinamika pemilu DPD di Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini adalah realitas yang memang mencerminkan struktur sosial-politik dan budaya masyarakat di daerah ini. Dan realitas ini harus dilihat sebagai sebuah kewajaran karena proses politik apapun tidak pernah berada dalam ruang yang vakum budaya dan sejarah.

Dengan demikian, perspektif mengenai pemilu DPD ini harus diletakkan bukan untuk mengevaluasi pola-pola dukungan yang berbasis ikatan solidaritas lokal, mengingat ikatan semacam ini merupakan realitas yang eksis dan fungsional di tengah-tengah masyarakat lokal. Akan tetapi lebih pada sejauh mana ikatan solidaritas lokal ini memiliki signifikansi baru dalam konteks sistem demokrasi yang ditandai oleh pelembagaan sistem perwakilan aspirasi, pengembangan ikatan masyarakat warga yang lebih luas dan proses pengambilan keputusan yang rasional dan mencerminkan kepentingan publik. Dalam pengertian terakhir ini maka apa yang telah berlangsung selama proses pemilu DPD lalu memberikan banyak alasan untuk optimis.

4.1. Pemilu DPD dan Sirkulasi Elit Politik Baru

Pemilu DPD pada awal bulan April lalu berhasil menjaring empat orang dengan perolehan suara terbanyak yang mengantarkan mereka sebagai anggota DPD terpilih di parlemen mewakili Provinsi Sulawesi

Tengah. Empat orang peraih suara terbanyak ini berturut-turut adalah Nurmawati D. Bantilan, Roger Tobigo, M. Ichsan Loulembah, dan Faisal Mahmud.

Yang menarik adalah anggota DPD terpilih ini ternyata didominasi oleh tokoh-tokoh muda dari kalangan profesional. Dari keempat anggota terpilih, hanya Tobigo yang sudah cukup berumur, sementara tiga anggota lainnya berusia 40 tahun ke bawah. Tobigo juga merupakan satu-satunya anggota terpilih yang memiliki latar belakang pensiunan PNS dan pernah duduk sebagai pejabat di lingkungan birokrasi pemerintah. Dengan demikian, sebagian besar (75%) anggota DPD yang terpilih adalah tokoh baru yang sama sekali belum pernah menjadi bagian dalam sirkulasi elit politik di daerah ini pada masa sebelumnya.

Kalau diperhatikan, peta dukungan suara untuk masing-masing anggota terpilih ini relatif terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu. Tabel berikut menyajikan tiga basis utama dukungan suara bagi masing-masing anggota DPD terpilih ini.

Tabel 7. Basis Dukungan Empat Anggota DPD Terpilih

Nama Anggota DPD Terpilih	Daerah Dukungan Terbesar I	Suara di Daerah tsb		Daerah Dukungan Terbesar II	Suara di Daerah tsb		Daerah Dukungan Terbesar III	Suara di Daerah tsb	
		Pmngkt	(%)		Pmngkt	(%)		Pmngkt	(%)
1. Nurmawati D. Bantilan	Toili-Toili	I	44,2	Luwuk	I	22,8	Banggai	I	35,7
2. Roger Tobigo	Poso	I	45,5	Morowali	I	20,6	Luwuk	II	8,7
3. M. Ichsan Loulembah	Donggala	I	14,6	Palu	I	14,9	Parigi	III	9,5
4. Faisal Mahmud	Donggala	II	9,4	Parigi	IV	9,2	Palu	II	11,9

Sumber: Diolah dari data KPU Provinsi Sulawesi Tengah

Catatan: Nomor di depan nama anggota DPD terpilih menunjukkan urutan peringkat perolehan suara secara keseluruhan di tingkat provinsi

Seperti terlihat dalam tabel di atas, dukungan suara untuk masing-masing anggota cenderung terkonsentrasi di daerah-daerah di mana basis tradisional mereka cukup kuat. Tiga basis dukungan suara Nurmawati, misalnya, secara jelas memperlihatkan dominasi jaringan kekerabatannya di wilayah timur Provinsi Sulawesi Tengah. Sementara itu, dominasi Tobigo di Poso dan Morowali adalah cerminan dari jaringan kekerabatannya, meski yang lebih menentukan perolehan suaranya adalah dukungan kuat dari komunitas Kristen di dua daerah ini. Sedangkan dukungan suara yang diperoleh Tobigo di Luwuk tidak terlepas dari kiprah sebelumnya selama ia menjabat sebagai Pembantu Gubernur di daerah ini.

Sementara itu, basis dukungan Ihsan yang terkonsentrasi di Donggala, Palu dan Parigi juga tidak terlepas dari jaringan kekerabatannya yang berada di daerah ini. Di samping itu, yang juga merupakan faktor yang menentukan, tiga daerah ini adalah wilayah yang paling banyak memperoleh informasi mengenai gagasan-gagasan politik Ihsan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya selama kampanye; begitu juga informasi mengenai *track record* Ihsan pada masa sebelumnya.

Mirip dengan kasus Tobigo, perolehan suara Faisal di tiga basis dukungannya pada dasarnya mencerminkan pengaruhnya di kantong-kantong organisasi keagamaan Al-Khairat. Profesinya sebagai dai terkenal, penyelenggara bimbingan haji, dan juga Rektor Universitas Islam Al-Khairat membuatnya memperoleh popularitas dan dukungan suara yang lebih banyak dibanding calon anggota DPD dari tokoh-tokoh Al-Khairat yang lain.

Seperti telah dikemukakan di depan, tampilnya tokoh-tokoh muda ini merupakan suatu dobrakan bagi kebuntuan dalam sirkulasi elit politik di tingkat regional. Namun, yang juga tidak kalah penting, dominannya perolehan suara tokoh-tokoh muda di basis-basis dukungannya ini juga mengindikasikan terjadinya pergeseran dalam ikatan-ikatan solidaritas tradisional di tingkat masyarakat lokal. Kecilnya perolehan suara calon-calon anggota DPD yang lebih senior di basis kekerabatan yang sama membuktikan bahwa preferensi pilihan masyarakat ternyata sudah bergeser menjadi lebih rasional dan bernuansa, serta tidak lagi berjalan seturut pola patron-klien dalam kultur tradisional yang berpusat pada figur-figur senior (*totua mpangi; totua ngata* dan semacamnya).⁷

Meskipun dalam ranah tertentu peran tokoh tradisional ini masih sangat vital, namun dalam "arena" (*field*) berbeda yang lebih formal, seperti kompetisi pemilu DPD, ketokohan tradisional semata tampaknya tidak lagi menjadi faktor yang bisa memikat preferensi pemilih. Hal inilah yang menjelaskan mengapa tokoh-tokoh etnis dari generasi senior ini, termasuk yang menjabat dalam organisasi etnis yang cukup besar, tidak mendapatkan suara yang signifikan dalam pemilu ini. Sebaliknya, ketokohan kalangan muda yang dianggap profesional, progresif, dan kompeten kini telah menjadi "simbol" baru yang lebih menarik perhatian masyarakat lokal.

4.2. Solidaritas Lokal, Legitimasi Politik Baru, dan Demokrasi Deliberatif

Pengelompokan dukungan politik berbasis ikatan solidaritas lokal merupakan fenomena lumrah yang selalu menyertai sistem pemilu distrik. Hasil pemilu DPD yang baru lalu juga memperlihatkan peta dukungan politik

⁷ Tentang *Totua Ngata* dan fungsi sentralnya dalam komunitas-komunitas tradisional, lihat M. Shohibuddin (2003), khususnya Bab 2.

di tiap-tiap daerah yang secara signifikan teralokasikan pada figur-figur yang dikenal luas dan berpengaruh di daerah masing-masing (lihat Tabel 5 dan 6).

Bagaimanapun, bentuk-bentuk ikatan solidaritas lokal yang teraktualisasi dalam dukungan terhadap calon anggota DPD itu telah mendapatkan konteks yang sama sekali baru. Konteks dimaksud, yaitu pelaksanaan pemilu DPD, telah memberikan signifikansi berbeda pada ikatan solidaritas lokal ini, yakni sebagai basis legitimasi baru bagi proses rekrutmen politik dan proses demokratisasi yang lebih luas.

Hal ini karena pemilu DPD lebih bersifat personal tanpa melalui mediasi partai politik apapun. Dengan demikian, pengelompokan dukungan politik yang berbasis ikatan solidaritas lokal ini secara nyata telah mewujudkan basis konstituen yang jelas bagi para calon anggota DPD; suatu hal yang tidak terjadi pada pemilu parpol. Dengan basis konstituen yang jelas ini maka calon anggota DPD yang terpilih nantinya dituntut untuk mempertanggungjawabkan amanat yang diterimanya kepada konstituen yang memilihnya itu.

Demikian pula, basis konstituen yang lebih jelas ini juga memungkinkan proses pelebagaan komunikasi politik yang lebih lancar dan otentik antara komunitas lokal dengan para anggota DPD terpilih itu sendiri, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui mediasi lembaga-lembaga kepemimpinan informal yang ada dalam masyarakat. Memang, yang terakhir ini sangat bergantung dan ditentukan oleh visi dan kapabilitas para anggota DPD yang terpilih itu sendiri serta berjalannya fungsi-fungsi *leadership* di dalam masyarakat.

Berbicara mengenai anggota DPD terpilih, keempatnya ini membentuk komposisi yang menarik. Dari keempat orang ini, 3 orang muda dan 1 tua; 3 orang tidak memiliki pengalaman birokrasi dan 1 orang adalah pensiunan pejabat senior; 3 laki-laki dan 1 perempuan; 3 orang Muslim dan 1 orang Kristen. Meskipun latar belakang semacam ini mungkin tidak relevan, bagaimanapun hal itu mencerminkan realitas sosial-politik dan struktur demografis yang ada di Sulawesi Tengah. Dengan demikian, komposisi ini juga mencerminkan perimbangan dari berbagai kekuatan yang ada dalam masyarakat sehingga cerminannya yang proporsional dalam komposisi anggota DPD memungkinkan untuk merepresentasikan kekuatan-kekuatan tersebut secara merata.

Sementara itu, menyangkut visi dan misi para anggota DPD terpilih ini, *track record* mereka dan apa yang mereka lakukan selama proses kampanye yang baru lalu agaknya memberikan harapan yang besar. Meski sebagian besar dari mereka memiliki kekerabatan yang luas, namun terlepas dari ini hampir semua mereka mengembangkan komunikasi politik yang

bersifat kontraktual dan mengemukakan isu-isu spesifik yang berkaitan dengan berbagai persoalan konkret di tingkat lokal (lihat tabel 3 di atas).

Tabel 8. Karakteristik Komunikasi Politik Empat Anggota DPD Terpilih Selama Kampanye Pemilu

Nama	Strategi Kampanye	Kelompok yang Dimobilisasi	Media Kampanye	Isu-isu Kampanye
Nurmuwajid D. Sanjiban	<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan dukungan dari jaringan kekerabatan Memantapkan jaringan Ormas Pemuda (OKP) di daerah-daerah Menarik dukungan kaum perempuan Menampilkan diri sebagai figur muda yang capable dan sudah membudikan karya buat masyarakat dalam kapasitas Pimpinan Telekomunikasi maupun Ketua DPD I KNPI Sulteng 	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan kerabat Ormas Pemuda (OKP) Kaum perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> Spanduk dan baliho dengan bahasa yang beragam sesuai daerah Kartu nama Dialog Kunjungan 	<ul style="list-style-type: none"> Penerkatan wilayah Prov. Sulawesi Timur Isu gender Pendidikan perempuan Ekonomi masyarakat
Roger Toblo	<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan dukungan dari jaringan kekerabatan Memainkan sebagai calon tunggal yang mendapatkan dukungan gereja Menggalang dukungan di kalangan rekan mantan pejabat maupun kerabat di kalangan PNS yang sudah dikawal lama 	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan kerabat Kelompok agama Kelompok yang berlatar belakang PNS atau pensiunan 	<ul style="list-style-type: none"> Kartu nama Dialog Kunjungan 	<ul style="list-style-type: none"> Memperkenalkan poleni daerah Sulteng Pendidikan Agama
M. Ihsan Lokembah	<ul style="list-style-type: none"> Menarik menggunakan isu-isu primordial untuk kampanye Membangun komunikasi politik yang intensif Menyampaikan gagasan-gagasan politik melalui berbagai media cetak, elektronik dan melalui diskusi-diskusi Menampilkan diri sebagai figur muda pembaharu Menampilkan diri sebagai tokoh profesional 	<ul style="list-style-type: none"> Kaum muda Ormas Pamali mengambang 	<ul style="list-style-type: none"> Spanduk Baliho Poster Kartu nama Buletin Dialog Diskusi Kampanye umum Media massa 	<ul style="list-style-type: none"> Naraca politik tahunan Pelembagaan komunikasi politik Ekonomi rakyat PLTA Lindu Konservasi Otonomi daerah
Faisal Mahmud	<ul style="list-style-type: none"> Memantapkan dukungan dan jaringan kekerabatan Memantapkan dukungan dengan meningkatkan popularitas sebagai dal Menggalang dukungan dari kalangan anggota AI-Khairat 	<ul style="list-style-type: none"> Jaringan kerabat Jamaah-jamaah pengajian Basik-basik AI-Khairat 	<ul style="list-style-type: none"> Kartu nama Dialog Kunjungan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan mutu pendidikan tinggi Kesejahteraan sosial Agama

Sumber: Data Primer

Apabila komunikasi politik "modern" yang dibawakan oleh para anggota DPD terpilih seperti tergambar dalam Tabel 7 di atas dapat beresonansi dengan saluran-saluran komunikasi politik di tingkat bawah, dengan melibatkan berbagai level kepemimpinan lokal, maka hal ini jelas merupakan sumbangan praktis yang nyata bagi pengembangan budaya politik baru yang lebih demokratis dan partisipatif. Secara teoritis gejala menuju ke arah ini amatlah signifikan khususnya dalam kaitan dengan bentuk-bentuk demokrasi seperti apa yang berlangsung di tingkat lokal.

Forero (2001) misalnya, membedakan tiga jenis demokrasi, yaitu demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, dan demokrasi partisipatoris. Demokrasi langsung adalah pengambilan keputusan dengan referendum, tanpa memerlukan pertimbangan mendalam warga negara dan tanpa perantara. Demokrasi perwakilan adalah pengambilan keputusan oleh

perantara, tanpa pertimbangan mendalam dari warga negara. Sedangkan demokrasi partisipatoris adalah demokrasi yang dicirikan oleh kriteria kunci adanya pertimbangan dari warga negara dalam proses pengambilan keputusan.

Mengacu pada definisi Forero ini, para anggota DPD merupakan perantara dalam jenis demokrasi perwakilan. Namun, berbeda dengan perwakilan dari kalangan partai, para anggota DPD ini memiliki kemungkinan dan juga mendapatkan harapan yang besar untuk bisa melibatkan pertimbangan mendalam dari konstituen yang diwakilinya dan yang telah memilihnya. Seperti yang dinyatakan Forero sendiri, demokrasi partisipatoris yang berbasis pada pertimbangan masyarakat (demokrasi deliberatif) bisa melibatkan perantara ataupun tidak, dan bisa saja ada interaksi dengan beberapa otoritas yang dipilih melalui saluran demokrasi perwakilan.

Mengupayakan agar demokrasi perwakilan dapat bersinergi dengan demokrasi deliberatif adalah tantangan yang dimintakan baik pada anggota DPD terpilih maupun para pemimpin informal pada berbagai level tingkatannya yang ada di dalam masyarakat. Tantangan ini akan dapat dipenuhi apabila kedua belah pihak mau dan mampu menjalin serta melembagakan komunikasi politik yang intens dan otentik. Dengan demikian, maka tidak ada kesenjangan antara proses pengambilan keputusan yang berlangsung di antara para wakil di lembaga parlemen dengan harapan, aspirasi dan opini yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Dengan mengacu pada proses pemilu DPD yang telah berlangsung serta memperhitungkan visi politik dan kapabilitas para anggota DPD terpilih, maka ada banyak alasan untuk merasa optimis. Namun, sejauh manakah harapan itu benar-benar dapat diwujudkan, ataukah sebaliknya anggota DPD ini akan tercerabut dari akarnya sendiri, maka hal itu terpulung pada kinerja mereka selama masa jabatan lima tahun mendatang.

5. PENUTUP

Making democracy work. Ungkapan dari Putnam ini sering dikemukakan untuk menekankan bahwa membuat demokrasi bekerja membutuhkan lebih dari sekedar terpenuhinya instrumen-instrumen formal kelembagaan demokrasi. Agar dapat berjalan demokrasi juga perlu untuk tertambatkan (*anchored*) dalam institusi-institusi dan beragam mekanisme informal yang tumbuh dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai "syarat-syarat informal untuk bekerjanya demokrasi".

Kasus pemilu DPD di Provinsi Sulawesi Tengah memberikan bahan-bahan empiris yang kaya dan menarik mengenai hal tersebut. Berlangsung dalam konteks sosio-politik regional yang ditandai oleh jaringan

kekerabatan yang kuat dan efektif, pemilu DPD ini ternyata berhasil membawa berbagai perubahan baru yang signifikan. Dari segi proses rekrutmen politik, pemilu DPD ini berhasil menjaring calon-calon anggota DPD yang sangat beragam latar belakang profesi dan aktivitas sosialnya. Namun pada umumnya, mereka adalah figur-figur muda yang tidak pernah terlibat dalam organisasi politik dan birokrasi pemerintahan. Dengan kata lain, mereka adalah pendatang baru yang tidak pernah menjadi bagian dalam sirkulasi elit sebelumnya.

Disituasikan oleh konteks sosio-kultural dan politik semacam itu, pemilu DPD kali ini banyak diwarnai oleh bentuk-bentuk mobilisasi politik yang berbasiskan ikatan etnis/kekerabatan dan keagamaan. Dalam sistem pemilu distrik, hal semacam ini adalah sesuatu yang lazim. Bagaimanapun, proses pemilu DPD ini juga menyaksikan munculnya bentuk-bentuk mobilisasi politik yang lebih bersifat kontraktual yang ditandai dengan komunikasi politik yang sehat, disertai dengan penawaran program-program spesifik, dan merespon isu-isu lokal yang berkembang di masyarakat.

Hasil perolehan suara dalam pemilu ini menunjukkan bahwa peta dukungan bagi calon anggota DPD berkorelasi positif dengan daerah asal calon tempat di mana jaringan kekerabatannya terdapat. Hal ini menunjukkan fenomena pengelompokan dukungan politik berbasis ikatan solidaritas lokal, dalam hal ini berupa jaringan solidaritas kekerabatan atau dalam variasi lain berupa solidaritas keagamaan.

Meskipun peta dukungan politik terkonsentrasikan pada basis-basis dukungan tradisional, bagaimanapun juga konteks pelaksanaan pemilu distrik ini telah memberikan signifikansi baru pada ikatan solidaritas lokal ini, yaitu sebagai basis legitimasi baru bagi proses rekrutmen politik dan proses demokratisasi lebih luas. Sebab, hal itu secara nyata telah mewujudkan basis konstituen yang lebih jelas yang memungkinkan proses pelembagaan komunikasi politik yang lebih otentik antara anggota DPD terpilih dengan konstituen yang diwakilinya.

Hasil pemilu DPD memberi cukup harapan bahwa hal ini dapat terwujud. Pertama, meski dukungan ikatan solidaritas tradisional cukup menonjol, namun dukungan tersebut diarahkan kepada tokoh-tokoh muda yang bervisi politik baru dan memiliki kapabilitas yang telah terbukti. Hal ini jelas mengindikasikan terjadinya pergeseran dalam ikatan solidaritas tradisional di mana preferensi politik tidak lagi berjalan seturut pola patron-klien yang ada melainkan sudah lebih bersifat rasional dan bernuansa. Kedua, para anggota DPD terpilih sendiri dari segi komposisi dan visi politik memberi harapan besar mampu membawakan komunikasi politik yang lebih

modern pada konstituen masing-masing yang secara proporsional telah terwakili.

Berbagai perkembangan empiris di lapangan ini secara teoritis sangat signifikan untuk memunculkan corak "demokrasi deliberatif", yakni demokrasi yang melibatkan pertimbangan masyarakat secara memadai. Hal ini akan terwujud apabila anggota DPD terpilih (sebagai perantara dalam "demokrasi perwakilan") dapat mengembangkan suatu mekanisme dan kelembagaan komunikasi politik yang intens dan otentik dengan berbagai level kepemimpinan informal yang ada dalam masyarakat lokal yang menjadi konstituennya. Dengan demikian, maka tidak ada kesenjangan antara proses pengambilan keputusan yang berlangsung di antara para wakil di lembaga parlemen dengan harapan, aspirasi dan opini yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

6. BIBLIOGRAFI

- Amalik, Denny J. 2003. "DPD, Forum Petualang Politik?" *Radar Sulteng*, 12 September.
- Dahl, Robert. 1989. *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press.
- Forero-Pineda, Clemento. Tt. "Participatory Democracy in Latin America: A Comparative Analysis." Diakses dari www.isnie.org/ISNIE01/Papers01/forero-pineda.pdf (02/062004 7:39:33).
- Haris, Syamsuddin dkk. (Tim Peneliti P2P LIPI). Tt. "Persepsi Masyarakat Tentang Partai Politik Peserta Pemilu 2004: Studi Kasus Enam Daerah." Laporan Penelitian.
- Kristiadi, J. 2004. "Political Parties and Democracy." *The Indonesian Quarterly*, Vol. 32, No. 3, Third Quarter 2004.
- Percik (Persemaian Cinta Kasih). 2004. "Term of Reference Seminar Internasional V Dinamika Politik Lokal di Indonesia: 'Demokrasi dan Potret Lokal Pemilu 2004'." Tidak diterbitkan.
- Putnam, Robert D., Robert Leonardi and Rifaella Y. Nanetti. 1993. *Making Democracy Work*. Princeton: Princeton University Press.
- Qodari, Muhammad. 2004. "Menghitung Peluang Calon Anggota DPD." *Suara Pembaruan*, 22 April.
- Shohibuddin, M. 2003. "Artikulasi Kearifan Tradisional dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Sebagai Proses Reproduksi Budaya. Studi

Komunitas Toro di Pinggiran Kawasan Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah." Tesis S2 Program Studi Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

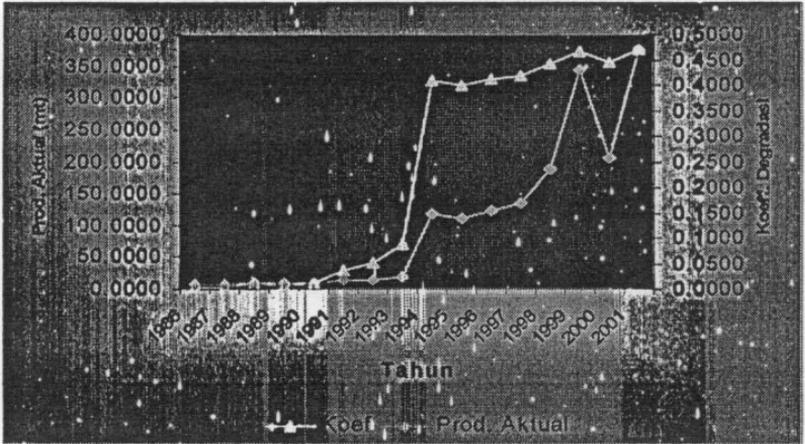
Soetarto, Endriatmo. 2002. "The 'Cultural Core' in Multiethnic Communities and its Impact on Agrarian Resource Management." STORMA Discussion Series No. 10.

Sugiya, Aritasius. 2004. "Potret Anggota Dewan Perwakilan Daerah: Wajah Baru Dominasi Senator ala Indonesia." *Kompas*, 26 Mei.

Lain-lain

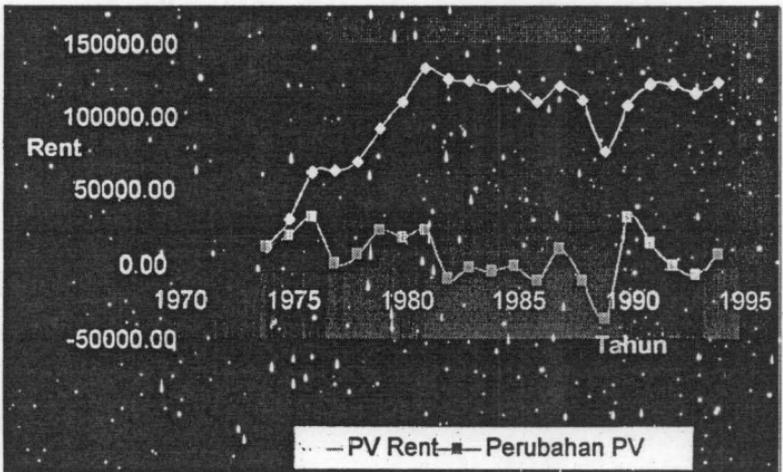
1. Data-data Perolehan Suara Hasil Pemilu 2004, Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Data Pemilih, Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Biodata Calon Anggota DPD Provinsi Sulawesi Tengah, Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Wawancara dengan beberapa anggota timses.
6. Wawancara dengan anggota DPD terpilih selama Lokakarya Calon Anggota DPD Terpilih Periode 2004-2009, tanggal 20-23 Juni 2004 di Hotel Hilton Jakarta.

Lampiran 9: Grafik Kelebihan Tangkapan (*Economic Overfishing*) di Pantura



Laju degradasi sumberdaya meningkat sejalan dengan peningkatan produksi

Lampiran 10. Grafik Depresiasi rente ekonomi sumberdaya (sejak 1983 keatas): *Estimated Economic loss* mencapai sebesar Rp 25 milyar per tahun



Laju degradasi sumberdaya meningkat seiring dengan peningkatan produksi